

LA NAKKA DALAM BINGKAI PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU 1960-1965

Muhammad Zainuddin Badollahi¹

¹Politeknik Negeri Pariwisata Makassar
muhammadzainuddinb@gmail.com

Hilda Anjarsari²

²Universitas Hasanuddin
Hildaanjar221@gmail.com

Intan Lisu Tandungan³

³Universitas Hasanuddin
Intanlisutandungan@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the condition of Barru during the reign of La Nakka, but also to find out what reactions arose among local authorities when Barru changed from an autonomous region to a level II district. In addition, to find out what policies were issued during his reign. This study uses the methods of source collection, verification, interpretation and writing. The results of the study found that as the first Regent in Barru, La Nakka succeeded in building an independent district in agriculture, education and transportation facilities. The opening of a road in Pekkae that connects Soppeng with Barru Regency is one of the proofs of its success. In addition, La Nakka also built many schools for the advancement of education in Barru Regency.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi Barru pada masa pemerintahan La Nakka, selain itu juga mengetahui reaksi apa saja yang timbul dikalangan penguasa lokal ketika Barru berubah dari daerah swapraja menjadi Kabupaten tingkat II. Selain itu juga untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dikeluarkan selama pemerintahannya. Penelitian ini menggunakan metode yaitu pengumpulan sumber, Verifikasi, interpretasi dan penulisan. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagai Bupati pertama di Barru, La Nakka berhasil membangun Kabupaten yang mandiri di bidang pertanian, pendidikan dan sarana transportasi. Pembukaan jalan di Pekkae yang menghubungkan Soppeng dengan Kabupaten Barru salah satu bukti keberhasilannya. Selain itu La Nakka juga banyak membangun sekolah untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Barru.

Kata Kunci: *Barru, La Nakka, Kebijakan.*

PENDAHULUAN

Sejak kebangkitan Nasional yang berawal pada waktu didirikannya “ Budi Utomo” pada 1908 dan pergerakan nasional yang dinyatakan bermula dari Sumpah Pemuda 1928 hingga daerah ini diduduki oleh Jepang, partai-partai politik maupun organisasi-organisasi sosial dilarang, bahkan rakyat juga dilarang berkumpul lebih-lebih lagi membicarakan persoalan politik (Kadir, 1984:112).

Perhatian Jepang terhadap Asia Tenggara tidak lebih dari hanya ingin mendapatkan sumber daya alam. Ini dibutuhkan untuk melaksanakan modernisasi setaraf Eropa dan Amerika sebagai modal, dan juga disebutkan karena Asia relatif lebih dekat dengan Jepang. Pendudukan Jepang dengan segala aksinya telah menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme (Tanaka, 1982:93). Tidak dipungkiri bahwa Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang juga sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Barru.

Jepang berusaha memutuskan semua hubungan dengan zaman kolonial Belanda secara simbolis. Sifat turun temurun raja-raja yang swapraja tidak diterima. Hubungan-hubungan perjanjian Belanda dengan mereka semuanya dibatalkan. Gerakan yang aktif pada zaman Belanda juga dibubarkan. Dengan pengecualian penting, perkumpulan Islam yang berpengaruh (Reid, 1996:17).

Keadaan pemerintahan terus mengalami perubahan dari setiap periodenya. Sejak masuknya kolonial Belanda pada 1905, telah membawa perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan. Kemudian disusul periode pemerintahan Jepang dengan sistem pemerintahan militernya, dan pada masa pendudukan kembali Kolonial Belanda yang kemudian membentuk Negara federasi. Setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), muncul berbagai gejolak sebagai ungkapan rasa tidak puas dari rakyat Barru. Hal ini terbukti dengan peristiwa pada tanggal 22 April 1950 dengan adanya revolusi yang meminta agar NIT dan RIS melebur kedalam RI, dan meminta agar Barru pada saat itu dijadikan sebagai Daerah Otonom.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.34 tahun 1952 daerah Sulawesi Selatan, terdiri atas tujuh daerah Swatantra, berdasarkan penyesuaian Penetapan Gubernur Timur Besar No.21 tanggal 24 Februari 1940 (Bijblad No.14377). berdasarkan PP. Bo.21 Sulawesi selatan terdiri atas Kota besar Makassar, Afdelling Makassar, Afdelling Parepare, Afdelling Mandar, Afdelling Luwu, Afdelling Bonthain, dan Afdelling Bone. pada 1952 penduduk Sulawesi Selatan sekitar 4.380.000 jiwa. Dari angka-angka ini dapat diperkirakan bahwa pada 1940-an penduduk Sulawesi selatan sekitar 3.000.000 jiwa (Sjafei, 1981/1982:1).

Sejak 1952, tindakan protes dan tuntutan agar Barru dijadikan Kabupaten terus dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI). Sementara itu, dilain pihak partai Bangsawan Nasional Indonesia (PBNI) justru menentang pembentukan Kabupaten akan tetapi mereka berkeinginan untuk tetap mempertahankan pemeritahan Swapraja (Departemen P&K Seksi Kabupaten Barru, 1983:3). Hal ini mempunyai kesan tersendiri dalam mewarnai percaturan politik pemerintahan di Sulawesi Selatan terkhusus Barru.

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Berru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah Onder Afdeling Barru, yang bernaung dibawah Afdeling Parepare. Sebagai kepala Pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang kontrolir Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai *Zelfbestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Kerajaan Barru menjadi Swapraja pada masa Kalimullah Djonjo Karaeng Lembang Parang yaitu di tahun 1908 kerajaan Barru menjadi Onder Afdelling dan dibawah pengawasan *Controlleur* Belanda hingga tahun 1942. Kemudian Jepang datang tahun 1942 dan melanjutkan pemerintahannya hingga tahun 1945. Setelah Jepang berakhir kembali kerajaan Barru dibawah penguasaan *Controlleur* Steller yang berkuasa di Barru sampai tahun 1946. Pada tanggal 9 September 1945 Andi Sadapoto yaitu putera Karaeng Lembang Parang diangkat menjadi raja untuk menggantikan Ayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, Pada tanggal 24 Februari 1960 Daerah Barru ditetapkan sebagai sebuah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibukota Barru. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada ± 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, ibukota Sulawesi Selatan.

Bupati pertama Kabupaten Barru adalah La Nakka. Pada masa La Nakka diangkat menjadi Bupati Barru kondisi politik dapat dikatakan belum sepenuhnya stabil. Hal ini tentunya diakibatkan oleh adanya gangguan keamanan yang bertendensi politik. Baik itu dari DI/TII maupun dari Komunis dapatlah dibayangkan bagaimana pahitnya kehidupan yang dialami masyarakat Barru pada saat itu, yang tidak hanya dialami oleh masyarakat

Barru tapi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bahkan sampai di Sulawesi Tenggara.

La Nakka adalah seorang perwira militer yang berpangkat Kapten yang berjuang bersama Saleh Lahade dan Andi Mattalatta, Mereka pertama kali mendarat di Garongkong di Kabupten Barru. La Nakka sendiri berasal dari Bulukumba. Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Bupati pertama di Barru sangat banyak rintangan yang dihadapi, situasi politik yang tidak stabil akibat adanya pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan juga memberikan dampak yang cukup besar bagi Kabupaten Barru pada saat itu. Kebijakan politik dikeluarkan untuk menjaga stabilitas politik dimana banyak tentara dikerahkan untuk menjaga keamanan dan meredam pemberontakan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai bupati pertama di Barru sangat banyak rintangan yang dihadapi, situasi politik yang tidak stabil akibat adanya pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan juga memberikan dampak yang cukup besar bagi Kabupaten Barru pada saat itu. Kebijakan politik dikeluarkan untuk menjaga stabilitas politik dimana banyak tentara dikerahkan untuk menjaga keamanan dan meredam pemberontakan.

Dibidang ekonomi pertentangan kepentingan menyebabkan kondisi hidup rakyat terbelakang, karena cara-cara produksi lama tidak mampu menghadapi kapitalisme kolonial yang mempunyai organisasi dan teknologi modern yang mampu mengubah keadaan ekonomi yang ada (Kartodirjo, 1990:233). Sebagai Kabupten baru dalam rangka membangun daerah La Nakka sebagai Bupati Barru mengeluarkan kebijakan perbaikan ekonomi pada program mereka, misalnya dalam hal perpajakan daerah. Sebagai daerah yang terdiri dari pegunungan dan daerah pesisir tentu saja orientasi pekerjaan masyarakat yang ada di Barru yakni petani dan nelayan. Kebijakan panca usaha tani yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga diterapkan di Barru hal ini bisa dilihat dari peningkatan hasil pertaniannya.

Kenaikan produktivitas pertanian disalurkan pada investasi disektor industry maka pemupukan dan lain-lainnya itu agaknya akan dapat sungguh-sungguh memberikan sumbangan yang dinamis pada keadaan ekonomi umumnya (Geertz, 1983:153-154). Kondisi ekonomi yang mulai stabil di Kabupaten Barru membawa angin segar bagi masyarakat Barru. Dalam masa pemerintahan La Nakka banyak sarana yang dibangun seperti jalan dan tempat rekreasi. Kondisi politik mulai stabil (Wawancara : Ambo Dalle (84 tahun), Barru 13 Februari 2016).

Pada rentan waktu 1960 hingga 1965 banyak hal yang dialami oleh Kabupaten Barru sebagai sebuah kabupten yang baru berdiri ditengah kegoncangan politik yang dialami oleh Indonesia pada saat itu. Selama masa jabatan 5 tahun di Barru banyak hal yang telah dilakukan oleh La Nakka

sebagai seorang Bupati. Dari sini penulis ingin melihat perkembangan Kabupaten Barru sebagai sebuah Kabupaten baru dan kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh La Nakka untuk membangun Barru. Penulis melihat periode 5 tahun jabatan La Nakka.

Chairil dalam tulisannya Barru pada Periode Pendudukan Jepang 1942-1945, menunjukkan bahwa ambisi Jepang membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah kekuasaannya diwujudkan dengan mengadakan perang Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945 merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia karena terjadi perubahan mendasar pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Politik imperialisme Jepang di Indonesia terlihat berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam serta mengupayakan mobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan perang. Daerah Barru dimata pemerintahan Jepang merupakan daerah yang sangat mendukung akan kepentingan ekonomi Jepang. Karena sumber daya alam yang dimilikinya. Terbukti dengan dimasukkannya beberapa organisasi perusahaan Swasta Jepang di Barru untuk menguasai dan mengelolah sumber daya alam yang ada. Pendudukan ini menumbuhkan rasa patriotism dan nasionalisme yang mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan penentangan terhadap sikap Jepang (Chairil, 2000:46).

Asrullah M, “ Reaksi masyarakat Sulawesi Selatan Terhadap Negara Indonesia Timur”, memberikan gambaran reaksi dari rakyat tidak hanya dilakukan lewat mimbar parlemen NIT, dimana telah dijelaskan bahwa sejak 1945 hingga 1950, Makassar menjadi pusat kekuasaan dan ajang pertentangan politik dari berbagai aliran. Pembentukan NIT dapat dinilai sebagai kreatifitas lokal yang menginginkan Negara Indonesia berada dalam wujud federal yang demokratis. NIT memeparkan sejarahnya sendiri namun paham federal kemudian tenggelam oleh paham unitaris sehingga hari ini Negara Indonesia Timur tidak lagi muncul kepermukaan (Asrullah, 1994:121.)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan sebagai upaya memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip guna mewujudkan kebenaran dari suatu permasalahan yang ada. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian sejarah (historis). Untuk mendapatkan hasil penulisan yang berdasarkan penelitian sejarah, maka penelitian ini diupayakan untuk membuat suatu tulisan sejarah (histografi). Langkah-langkah yang ditempuh untuk menghasilkan tulisan sejarah adalah dengan mengikuti metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Louis, 1973:18).

Penelitian menggunakan data-data arsip yang ditemukan pada Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan dengan berpedoman pada Inventaris Arsip Propinsi Sulawesi Tahun 1946-1960, Arsip Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara (1960-1964) Vol I, Arsip Statis H.A. Rachman Tamma, dan mengumpulkan data-data mengenai laporan-laporan penting, surat-surat penting bahan-bahan dokumentasi (mengumpulkan foto dan Sk pelantikan La Nakka) yang sesuai dengan topik penelitian penulis. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Barru. Penelitian dilakukan sejak bulan Januari-Juni 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sistem Pemerintahan Barru Sebelum Proklamasi

Pada pertengahan 1906 Barru mulai diduduki tentara Belanda, setelah mengalami kekalahan perang yang pada saat itu dipimpin oleh Arung Tuwung Andi Koro Petta Bau (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Barru, 1983:38). Kekalahan yang sama juga dialami oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada saat itu. Sejalan dengan itu dilakukan penataan pemerintahan demi mempertahankan kekuasaannya didaerah ini. Tahun 1906 hingga 1916 pembagian wilayah administrasi pemerintahan terhadap daerah di Sulawesi dan daerah taklukan lainnya masih bersifat sementara berdasarkan keputusan sementara Gubernur N.H.A. Swart. Tertanggal 31 Desember 1906 No. 6041/2 tentang pembagian wilayah administrasi pemerintahan untuk daerah Sulawesi dan daerah taklukannya (Muhlis dkk, 1985:138). Hal dikarenakan masih adanya ketidakpuasan atas kehadirannya di daerah ini, berupa munculnya perlawanan-perlawanan yang dipimpin oleh penguasa dan bangsawan-bangsawan Sulawesi Selatan (Pawiloy, 1987:61).

Sementara itu sejak daerah Barru ditaklukan oleh Belanda, Struktur pemerintahan tidak mengalami perubahan sesuai dengan struktur pemerintahan pada masa pemerintahan tradisional. Hal ini diakibatkan oleh gejala yang timbul dari perlawanan yang dilakukan oleh penguasa elit lokal pada saat itu (Wawancara : Saifullah Ismail, 13 Februari 2016. Barru).

Akibat dari adanya perlawanan yang dilakukan oleh elit penguasa lokal di Barru, penataan pola pemerintahan yang baru sedikit tersendat. Daerah Sulawesi Sulawesi dibagi menjadi 7 daerah Afedelling yakni Afdelling Makassar, Bone, Bonthain, Parepare, Mandar dan Buton beserta pesisir timur Sulawesi. Barru sendiri dimasukkan dalam Afedelling Parepare yang disebut Onderafedeling Barru. Afdelling Parepare terdiri atas empat Zelfbestuur yakni Mallusetasi, Soppeng Riaja, barru dan Tanete.

Pada 1926 terjadi perubahan. Struktur pemerintahan di Barru dengan dibentuknya Barru menjadi Federasi dalam tiga buah Zelfbestuur

(pemerintahan kerajaan sendiri) yang masing-masing dikepalai oleh Raja dari turunan bangsawan tinggi (Hoofds Zelfbestuur) yang masing-masing bergelar Arung, yaitu Kepala Arung Barru, Kepala Arung Soppeng Riaja dan Kepala Arung Tanete. Seperti kebanyakan daerah di Sulawesi Selatan, raja yang menjabat dipilih oleh pihak pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan untuk meredam pemberontakan dari pihak kerajaan.

Pada 1938 di Barru terjadi juga perubahan (reorganisasi) dalam bidang susunan pemerintahan yaitu Onderafdeling Barru dikepalai seorang Controlieur yang dibantu oleh seorang Adspiran controlieur (Belanda totok) dan tiga orang pamong praja bumi putera (Hulp Bestuursassissten dan Ass Hulp Best) yang membantu tiga buah pemerintahan Zelfbestuur schap di Barru, Soppeng Riaja dan Tanete. Ketiganya berdiri sendiri dan masing-masing menjadi penguasa didaerahnya sebagai kepala eksekutif dan yudikatif dan diberikan hak sepenuhnya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari didaerahnya masing-masing sesuai dengan dasar yang telah diletakkan dalam peraturan Zelfbestuur regelan 1938 dan pedoman pelaksanaannya diatur dan ditentukan publikasinya.

Tahun 1942 ketika Jepang menang atas Belanda terjadi restrukturisasi pada pemerintahan di Indonesia yang berlaku umum untuk semua wilayah yang pernah dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Perubahan ini terjadi pada penamaan instansi dan penyebutan daerah. Hal ini dilakukan guna menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan Belanda yang telah bercokol di Indonesia lebih dari 350 tahun lamanya.

Sebelum ditandatanganinya piagam penyerahan tanpa syarat seperti tersebut diatas, bala tentara Dai Nippon melakukan serangan terhadap kedudukan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dalam dua arah, yakni dari arah Barat dan Utara. Dari arah Barat melalui Melaya, terus ke Singapura, Plaju dan Jawa sedangkan dari arah Utara melalui Philipina, kota Tarakan, Sulawesi dan Indoensia Bagian Timur (Darwas, 1990:101).

Jepang dalam masa pemerintahannya tetap memadukan sistem pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Hal ini dilakukan karena menyadari bahwa masyarakat Sulawesi Selatan sudah terbiasa dengan sistem pemerintahan bangsawan berdasarlan pangadereng yang harus dihormatinya (Pawiloy & Abduh,1979/1989) Dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya.

Pada masa pemerintahan Jepang, Sulawesi Selatan dibagi menjadi enam daerah kecil yang masing-masing disebut kanriken yakni (1) Makassar Ken Karikan dengan ibu kota Makassar meliputi Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Takalar, dan Jeneponto, (2) Parepare Ken Karikan dengan ibukota Parepare meliputi Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang.

(3) Luwu Ken Karikan dengan ibu kota Palopo meliputi, Palopo, Masamba, Malili, Makale dan Rantepao. (4) Bone Ken Karikan meliputi Bone, Soppeng dan Wajo. (5) Mandar Ken Karikan meliputi Majene, Polewali, Mamasa dan Mamuju, (6) Bonthain Ken Karikan meliputi Bonthain, Bulukumba, Sinjai dan Selayar (Departemen Dalam negeri Propinsi Sulawesi Selatan, 1991:237).

Sekilas Tentang La Nakka

La Nakka Semasa Sekolah

Politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu yang menyatakan bahwa hanya golongan bangsawan saja yang dapat mengenyam bangku sekolah memberikan peluang yang besar bagi La Nakka untuk menimba ilmu. Ia sempat sekolah di sekolah milik pemerintah Hindia Belanda di Makassar dan mengikuti pendidikan umum di Normaal School Makassar (S.G.B) sebelum melanjutkan studinya ke Bogor tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1932 mengikuti cursus pertanian di Bogor. Ia bersekolah di sana selama setahun dan menyelesaikan studinya pada tanggal 31 Agustus 1933. Ia kemudian bekerja terhitung dinas dengan gaji Rp.20 sebulan.

Setelah menyelesaikan studinya di Bogor, La Nakka kembali ke Sulawesi Selatan dan menjadi guru pertanian di Parepare mulai tanggal 1 September 1933 hingga 31 Agustus 1940, di Parepare ia sempat menjadi guru pertanian selama 7 tahun sebelum akhirnya dipindahkan ke Bonthain untuk menjadi guru pertanian juga disana pada tanggal 1 September 1940 sampai 31 Agustus 1943. Ia mengajar di sana selama 3 tahun dan akhirnya menikah.

La Nakka Dewasa dan Masa Kerjuangannya

Dalam kehidupan rumah tangga La Nakka menikah sebanyak 3 kali. Istri pertamanya adalah orang Bulukumba yang merupakan sepupu sekaligus dan memiliki dua orang anak yakni Alm. Mahsun lahir tanggal 1 Agustus 1935 di Bulukumba, Almarhumah S. Saima lahir tanggal 2 Juni 1938 (Wawancara: Lela Nakka, 3 April 2016). Istri keduanya adalah I Duppa lahir di Parepare, mereka melangsungkan pernikahan di Bulukumba dan Parepare. Pernikahan ini dilangsungkan pada tanggal 15 September 1938. Dari perkawinan ini lahirlah 3 orang anak yakni Moh. Natsir 16 Juni 1941 (sekarang menjabat sebagai pengurus dewan harian UPRI Makassar), S. Saleha lahir pada 17 November 1942 pada masa pendudukan Jepang, dan anak bungsunya adalah S. Sapiah yang lahir pada 15 Desember 1944. Istri ketiga La Nakka adalah orang Jawa, ketika dia memutuskan untuk terjun sebagai tentara dan berjuang di Jawa tepatnya di Yogyakarta. Ia lama menetap disana dan akhirnya bertemu dengan seorang gadis dan menikahinya. Dari pernikahannya ini ia mendapat seorang anak laki-laki yang diberi nama Sabaruddin yang dilahirkan pada

tanggal 24 Desember 1948, sebelum akhirnya meninggalkan Yogyakarta dan kembali ke Makassar.

September 1943 ia diangkat oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai Kepala Kantor Pembikinan Kapal (Minsen Unkokasi Parepare), Ia menjabat selama 2 tahun hingga Agustus 1945. Ketika Indonesia Mulai memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kekacauan politik terjadi dimana-mana sehingga terjadi restrukturasi pada bidang pemerintahan secara besar-besaran. September 1945 hingga Desember 1945 La Nakka memutuskan untuk mengubah jalur hidupnya dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya. Ia bergabung dengan PRI (Penunjang Republik Indonesia) Parepare dan bertugas sebagai ketua Gerakan Pandu Nasional Indonesia Parepare.

La Nakka kemudian bergabung dalam dunia militer dan pada Januari – Juli 1946 dan ikut dalam Persiapan Sulawesi bahagian urusan ekspedisi di Situbondo bersama dengan Kahar Muzakkar sebagai pimpinannya dan A. Mattalatta sebagai Wakil Pimpinan. Pada bulan Juli-Desember 1946 ia tergabung dalam TNI dengan pangkat Letnan Satu (Arsip Pribadi La Nakka).¹

La Nakka tidak hanya malang melintang dalam dunia keguruannya ia juga terlibat dalam dunia militer untuk berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap mempertahankan kedaulatan NKRI. Pengalaman dalam dunia kemiliteran tidak diragukan lagi pasca pulang dari Yogyakarta tahun 1951. Ia ditunjuk kembali sebagai anggota sekolah kader di Parepare pada setahun kemudian menjadi kepala keuangan sekolah tersebut (Arsip Pribadi La Nakka).²

La Nakka memutuskan untuk mengakhiri karirnya diketentaraan pada 31 Desember 1952 dan diberhentikan dengan hormat dari pangkat dan jabatannya dalam dinas ketentaraan atas permohonan sendiri dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selaku anggota militer dan diberikan hak menurut ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Darurat No.19 tahun 1950 (Arsip Pribadi La Nakka).³

Pada tanggal 24 Februari 1958 mendapat surat dari pusat perbendaharaan Negara di Makassar menyampaikan surat Penetapan pemberhentian pension oleh Menteri Pertahanan RI tanggal 22 Oktober 1957 No.Kpts.15167/7618/1-19/1957. Kemudian mendapat surat Keputusan menteri pertahanan No. MP/N/401/57 tanggal 7 Mei 1957. La Nakka juga dijadikan sebagai anggota Dewan Legiun Veteran RI berdasarkan surat penetapan

¹ Arsip Pribadi La Nakka yang dipegang oleh Siti Saleha, anak kedua La Nakka.

² Arsip pribadi La Nakka yang dipegang oleh Siti Saleha, anak kedua La Nakka.

³ Arsip Pribadi La Nakka yang dipegang oleh Siti Saleha, anak kedua La Nakka.

Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia No. 151/12/Prt/NBLV/II/58 tanggal 10 November 1957 terhitung mulai tanggal 25 Januari 1957.

Selama karir ketentaraanya ia sempat dianugerahi beberapa medali diantaranya:

1. 5 Oktober 1954 “Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia “ sesuai ketentuan dalam pasal 3 dari Undang-undang No. 20 tahun 1954 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
2. Pada tanggal 17 Agustus 1958 No. 32204 dianugerahi “Satyalencana Kesetiaan”, sesuai ketentuan dalam pasal 11 dari Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
3. Pada tanggal 17 Agustus 1958 No.09189 dianugerahi “Satyalencana Bakti” sesuai ketentuan dalam pasal 2 dari Undang-Undang Darurat No. 70 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
4. Pada tanggal 17 Agustus 1958 No.53983 dianugerahi “Satyalencana Peristiwa Aksi Militer Kesatu” sesuai ketentuan dalam pasal 16 dari Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
5. Pada tanggal 17 Agustus 1958 No.53983 dianugerahi “Satyalencana Peristiwa Aksi Militer Kedua” sesuai ketentuan dalam pasal 16 dari Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan
6. Tanggal 10 November 1958 No.36901 dianugerahi Tanda Jasa Pahlawan didalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan Negara ditanda tangani oleh Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI.
7. Tanggal 29 Januari 1959 No. 43585 dianugerahi “Satyalencana Gerakan Operasi Militer I” sesuai ketentuan dalam pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
8. Tanggal 29 Januari 1959 No. 08919 dianugerahi Satyalencana Gerakan Operasi Militer III” sesuai ketentuan dalam pasal 9 dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
9. Tanggal 29 Januari 1959 No. 57920 Satyalencana Gerakan Operasi Militer IV sesuai ketentuan dalam pasal 12 dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
10. Tanggal 29 Januari 1959 No. 57920 Satyalencana Gerakan Operasi Militer VI sesuai ketentuan dalam pasal 12 dari Peraturan Pemerintah

No. 59 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan (Arsip Pribadi La Nakka)

Atas semua tanda jasa dan baktinya kepada Negara Republik Indonesia La Nakka akhirnya dijadikan sebagai kepala Kantor Urusan Legiun Veteran lingkungan Makassar terhitung mulai tanggal 24 Maret 1958 berdasarkan Keputusan Menteri Muda Urusan Veteran RI No. 143/Kpts/tahun 1959 tanggal 3 November 1959, sebelum akhirnya diusulkan Oleh A. Mattalatta sebagai Bupati barru yang pertama karena dianggap mampu untuk membangun Barru menjadi sebuah Kabupaten yang mandiri dan menjadi Kabupaten yang dapat bisa memperbaiki taraf hidup warganya.

La Nakka ditetapkan sebagai Bupati pertama Kabupaten Dati Tingkat II Barru pada tanggal 1 Februari 1960 dan berakhir pada 1 Februari 1965 dengan pangkat Kapten. Selain sebagai guru, anggota militer dan Bupati pertama Kabupaten Tingkat II Barru ia juga adalah seorang ayah dan suami yang selalu dicintai oleh keluarganya. Dalam ingatan sang anak beliau adalah orang yang tegas, bertanggung jawab, tidak banyak bicara, sangat peduli dengan kehidupan sosial, dan penyayang (Wawancara: Siti Suleha, 2 April 2016).

Barru Pada Masa Pemerintahan La Nakka

Reaksi Penguasa Lokal

Kehadiran pemerintah Kolonial dan pendudukan Jepang praktis tidak mengubah lapisan sosial masyarakat di Sulawesi Selatan. Baik pada zaman kolonial maupun pendudukan Jepang, penguasa pribumi dijadikan sebagai penghubung antara penguasa dan penduduk setempat. Dengan kata lain pemerintah Kolonial tetap memelihara dan memperkuat hirarki sistem pemerintahan tradisional yang ada dengan raja, dalam situasi ini penguasa pribumi secara langsung menjadi broker kepentingan kolonial dan kepentingan masyarakat setempat.

Kelompok-kelompok yang pro terhadap Belanda senantiasa melancarkan pemberontakan dan menghasut warga yang peduli terhadap Republik, pada akhirnya bentrokan tak terelakkan antar kedua kaum ini. Disatu sisi golongan bangsawan ingin melanggengkan sistem feodalisme sedang disisi lain kaum revolusioner ingin pemerintah yang demokratis berbentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Perjalanan roda pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) di Barru terus mengalami goncangan dan kritikan-kritikan dari berbagai pihak atau menimbulkan rasa tidak puas dikalangan masyarakat, sehingga

Arsip pribadi La Nakka yang dipegang oleh Siti Saleha anak kedua La Nakka.

pada tahun 1955 KPN Patotoreng mengundurkan diri dan diganti oleh La Kitta hingga tahun 1958. Selanjutnya La Kitta juga mengundurkan diri dan diganti oleh KPN Aco pada tahun 1958 hingga 1960, lalu digantikan La Hudu sebelum pada akhirnya La Nakka dipilih menjadi Bupati pertama di Kabupaten Barru (Putri, 2002:41).

Terbentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI) yang dimaksudkan untuk mendemokratisir pemerintahan swapraja. Sebagaimana resolusi yang dikeluarkan Komite Nasional Indonesia, yang salah satu poinnya adalah menjadikan daerah swapraja Barru sebagai daerah otonom dalam wilayah Republik Indonesia. Mosi dari KNI ini ternyata mendapatkan tantangan hebat dari kelompok-kelompok yang ingin tetap mempertahankan daerah swapraja, sehingga keadaan Barru pada saat itu memanas hingga terbentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Barru pada tahun 1960.

Pada dasarnya perubahan status pemerintah yang ada di Kabupaten Barru sejak berubah menjadi sebuah Kabupaten banyak menggeser kedudukan penguasa elit lokal. Dimana banyak jabatan-jabatan adat yang dihilangkan kemudian diganti dengan struktur yang baru mengikuti sistem pemerintahan yang ada.

Kebijakan Politik

Sebagai seorang pemimpin dibutuhkan kharisma, Kharisma inilah yang dipunyai oleh seorang La Nakka dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kharisma adalah watak pribadi yang luar biasa. Seseorang dianggap sah atau memiliki watak pribadi istimewa, misalnya kepahlawanan, kesederhanaan, kejantanan, kejujuran dan kebijaksanaan atau semacam itu (Nasikun, 1987:38-39).

Diawal tahun 1961 sebagai tindak lanjut dari pemantapan birokrasi pemerintahan daerah. Maka reorganisasi pemerintahan di Barru terus berlangsung. Lingkungan pemerintahan bekas bekas swapraja dan distrik-distrik yang tradisional di lebur menjadi 5 (lima) buah lingkungan pemerintahan administratif yang disebut Kecamatan, yakni kecamatan Barru, Tanete Rilau, Tanete Riaja, Soppeng riaja dan Mallusetasi.

Dengan terbentuknya Kecamatan-kecamatan itu, maka dengan sendirinya sistem pemerintahan swapraja dan distrik-distrik di Barru terhapus. Pejabat-pejabat dialihkan menjadi pegawai negeri daerah otonom. Di tingkat pemerintahan bawahpun diadakan reorganisasi, yakni dibentuk Desa gaya baru dalam lingkungan Kecamatan-kecamatan. Desa gaya baru dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut kepala desa diangkat pula seorang imam desa yang dipilih bersama-sama dengan kepala desa. Dibawah desa tersebut terdapat RK dan RT (Putri, 2002:41).

Dibidang politik La Nakka mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian tunjangan terhadap pegawai Daerah Tingkat II Barru. Dampak yang besar dari kebijakan politik yang dikeluarkan oleh La Nakka adalah pemberian tunjangan bagi pegawai yang membawa angin segar untuk kesejahteraan para pegawainya, disamping itu pendirian rumah dinas untuk pegawainya juga merupakan hal positif untuk pegawai sehingga pegawai mempunyai rumah tinggal. Dampak lain adalah pengunduran diri La Nakka untuk lepas dari jabatannya membawa hal baru bagi Kabupaten Barru sebab karena hal ini maka di pilih lagi seorang bupati baru pada tahun 1965 yakni H. Machmud Sewang (1965-1980) yang menggantikan La Nakka. Hal ini didasarkan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1957 maka ditetapkan :

Memperlakukan mutasi-mutasi peraturan pemerintah No. 16 tahun 1959 tentang pemberian tunjangan daerah tidak aman kepada Pegawai negeri sipil berlaku pula bagi pegawai Daerah Tingkat II Barru yang namanya tersebut dalm lampiran surat keputusan ini.

Bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 1960 sampai tanggal 30 April 1961 selama enam bulan.

Bahwa bila ternyata dikemudian hari ternyata mendapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini, akan diubah/diperbaiki seperlunya (Inventaris Barru tahun 1920-1976 , Nomor Registrasi 93).

Latar belakang militer yang dimiliki oleh La Nakka juga berpengaruh dalam menjalankan roda pemerintahannya tingkat kedisiplinan yang tinggi dan loyalitas terhadap Negara selalu ia tunjukkan dengan cara mengabdikan pada Negara dan membangun Barru sebagai sebuah Kabupaten yang selalu setia pada NKRI. Hal ini terbukti ketika dikeluarkannya “seruan bersama” yang menyerukan kepada segenap golongan masyarakat di Dati II Barru untuk :

1. Dengan penghianatan Andi Selle Mattola (salah satu bawahan kahar Muzakkar dalam melakukan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan) yang penjelasannya berulang-ulang kali disiarkan melalui surat-surat kabar, maka oleh Komandan Resimen 142 sekali lagi memperingatkan kepada rakyat untuk segera melaporkan kepada yang berwajib (pemerintah-Tentara atau Polisi) bilamana ada yang mendengar atau melihat pasukan bekas Jon 003.
2. Supaya rakyat jangan memberi pertolongan atau memberi perlindungan kepada Andi Selle atau pasukannya karena P. J. M. Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata R.I./Pemimpin Besar Revolusi telah menyatakan bahwa mereka adalah musuh Negara.
3. Oleh karena gerombolan Kahar Muzakkar dengan semua pengikutnya harus dihancurkan sebelum 17-8-1964, maka kepada mereka yang ada keluarganya/anaknya di hutan menjadi musuh Negara, supaya segera

mengajaknya untuk menyerahkan diri kepada yang berwajib sebelum terlambat.

4. Barang siapa sengaja melindungi gerombolan Kahar Muzakkar termasuk Andi Selle dan kawan-kawannya atau sengaja tidak melaporkan bila ia melihat atau mendengar dimana mereka berada, maka dapat digolongkan sebagai musuh Negara dan diambil tindakan menurut hukum yang berlaku (.Inventaris Arsip Barru 1920-1976, Nomor Registrasi 190).

Seruan ini tidak hanya berbahasa Indonesia tapi juga ditulis dalam bahasa Bugis dengan tujuan agar semua orang di Barru mengerti akan hal tersebut. Pada dasarnya seruan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap Andi Selle dan bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka menumpas pemberontakan Andi Selle agar tercipta kondisi yang stabil diseluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Kebijakan Ekonomi

Dalam sejarah pembangunan Indonesia, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan bukan lagi merupakan hal baru. Upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi angka ketimpangan kemiskinan telah diupayakan melalui berbagai perundang-undangan dan peraturan sebagai perangkat pendukungnya.

Ketimpangan jelas menjadi penanda adanya masalah dan kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sebuah negara. Martin Ravallion, ekonom yang pernah bekerja di Bank dunia menunjukkan bahwa ketimpangan berpengaruh terhadap program penghapusan kemiskinan (Prastowo dkk, 2014:4)

Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan petani hingga terciptanya kondisi yang menguntungkan bagi petani maka perlu untuk memperbaiki sumber-sumber komunikasi yang berorientasi kota dan konsumsi, saluran-saluran komunikasi menembus wilayah pedesaan dengan lemah dengan isi yang tidak relevan, petani memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang terbatas dan tidak terorganisasi tidak berpolitik, ketidakmerataan dan kemampuan ekonomi dan perbedaan akses kepada informasi mengenai inovasi, inovasi tidak memadai, struktur sosial pedesaan yang menekan, prasarana tidak memadai, kebijaksanaan pertanian yang buruk dan keterpencilan dan isolasi geografis (Rogers, 1985:56) Berangkat dari hal ini maka dikeluarkan kebijakan ekonomi berkaitan dengan pertanian agar bisa membantu kehidupan petani.

Tujuan pembangunan pertanian meliputi peningkatan produksi, produktivitas, kualitas dan nilai tambah serta daya saing yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan

bahan baku untuk pangan serta non pangan dan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan memungkinkan untuk terjadinya perbaikan dan peningkatan kehidupan ekonomi dari setiap masyarakat yang terlibat didalamnya.

Khusus mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan dan peningkatan sistem perekonomian di Indonesia baru dilakukan pada saat Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Belanda setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag 1949. Setahun setelah Konferensi tersebut, yaitu tahun 1950 dikeluarkanlah suatu program ekonomi yang dinamakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) pada masa kabinet kerja pertama Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mohammad Natsir dari masyumi. Rencana ini dimaksudkan untuk membangun sektor industri dan pertanian (Sahajuddin, 2011:9).

10 Juni 1961 La Nakka bersurat kepada para pelaksana pemerintah wilayah dalam daerah tingkat II Barru dalam hal ini Dinas Pertanian untuk mengirimkan daftar rincian:

1. Nama-nama penggarap tanah-tanah sawah *ornamen* dan *ambsveleden*
2. Luasnya tanah-tanah *ornamen* dan *ambsvelden* yang digarap atau dikerjakan tiap-tiap petani dan hasilnya.
3. Luasnya tanah-tanah *ornamen* (tanah ulyat) dan *ambsvelden* (tanah pemerintah/negara) yang digarap dalam tiap-tiap desa (Inventaris Arsip Barru, Nomor Registrasi 335).

Hal dimaksudkan agar adanya pemerataan kepemilikan lahan pertanian yang dipunyai oleh setiap petani dan desa-desa dalam Kabupetan Barru. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan mengingat nantinya perincian sawah garapan menjadi acuan untuk membuat kebijakan dibidang pertanian.

Tahun 1963 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru mengeluarkan Instruksi No.10./Desa/1963 yang berisi “ Untuk mencegah penyiaran-penyiaran sokongan desa dan sekolah-sekolah dan lain-lain, dirasa perlu diadakan suatu pemungutan secara merata untuk seluruh rakyat, maka mulai tanggal 1 November 1963 dan seterusnya dianjurkan kepada setiap rumah tangga dalam Dati II Barru untuk menyumbangkan segenggam beras yang diambil dari persediaan masak (setiap hendak memasak diambil segenggam beras) dengan ketentuan beras ini tidak boleh diganti dengan membayarnya berupa mata uang. Untuk gerakan pengumpulan beras ini, disetiap rumah tangga dianjurkan untuk menggantung pundi-pundi (penyimpan) beras didapur. Setiap beras tersebut dikumpulkan oleh ketua rukun tetangga, kemudian menyerahkannya kepada kepala desa. Pemerintah menjual kepada J.B.P.P. setempat dan harganya disetor langsung kepada bendahara desa dan penggunaan harga beras ini dipakai untuk ongkos administrasi desa, gaji-gaji pegawai, perbaikan mesjid, sekolah-sekolah, jalan-jalan desa, bendungan

desa dan lain-lain (Inventaris Arsip Barru Tahun 1920-1976, Nomor Registrasi 131).

Selama masa pemerintahan La Nakka tidak hanya pertanian yang diperhatikan tapi juga masalah Koperasi. Di daerah Soppeng Riaja dibentuk sebuah Koperasi yang diberi nama “Lampoko” pada tanggal 29 Juni 1963. Koperasi ini adalah koperasi pertama yang ada di daerah ini adapun struktur organisasi dalam koperasi ini tidak jauh berbeda dengan koperasi lainnya yang ada di daerah lain. Ketua I koperasi adalah H. Muhammadiyah dan ketua II adalah Lambaseng. Ada ketentuan setoran yang harus dibayarkan oleh anggota yakni Rp. 5.000 untuk simpanan pokok, dan Rp. 250 untuk simpanan wajib (Inventaris Arsip Barru Tahun 1920-1976, Nomor Registrasi 287).

Dampak dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh La Nakka cukup dirasakan oleh warga masyarakat dalam lingkup Daerah Tingkat II Barru. Dalam rangka membangun daerah Tingkat II Baru guna mendukung pelaksanaan pembangunan Barru dalam hal ini menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari pajak, terutama pajak hasil bumi yang dikenakan kepada penggarap tanah, pajak kekayaan, pajak benda, dan pajak pendapatan. Disamping pajak, hasil pertanian juga merupakan salah satu sumber utama perekonomian Barru, sehingga tidak mengherankan jika Barru dikenal sebagai lumbung padi. Berkat pajak yang dibayarkan maka Kabupaten Barru dapat membangun daerahnya dengan membiayai pembukaan sarana dan prasarana untuk kemaslahatan bersama seperti pembukaan jalan di Pekkae untuk menghubungkan Barru dan Soppeng, tempat rekreasi, sekolah-sekolah, dan kantor.

Kebijakan Sosial Budaya dan Dampaknya

Pada tanggal 23 Agustus 1963 diadakan rapat di gedung DPRD Kabupaten Barru, rapat ini dihadiri oleh Dewan Guru-guru agama dan Bupati sendiri, tujuan dari diadakannya rapat tersebut adalah untuk memberantas buta agama di Kabupaten Barru. Untuk merealisasikan hal tersebut maka Bupati Barru yakni LaNakka mengeluarkan Instruksi kepada semua Guru-guru agama dengan bekerjasama guru-guru/ kepala sekolah dalam Daerah Tingkat II Barru, terhitung mulai tanggal 2 Desember 1963 swapraja melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Ibadah sembahyang berjamaah bagi kelas 5 (lima) dan 6 (enam) untuk Sekolah Dasar dan seluruh kelas untuk Sekolah Lanjutan Pertama baik Negeri maupun swasta pada waktu sembahyang Dzuhur, khusus bagi yang belajar pagi. Dan bagi yang belajar sore diwajibkan untuk sembahyang pada waktu Ashar.
2. Menyediakan waktu/ruangan serta membawa alat dan pakaian untuk melaksanakan sembahyang Jumat.

3. Hal-hal yang bersangkutan paut dalam pelaksanaan instruksi ini supaya dilaporkan kepada kami sekali sebulan.
4. Selesai (Inventaris Arsip Barru 1920-1976. Nomor Registrasi 382).

Seperti telah disinggung di bab sebelumnya La Nakka adalah seorang yang sangat taat beragama, Baginya untuk membangun sebuah daerah tidak hanya diperlukan sebuah keerdasaan intelektual semata tapi akhlak dan aqidah juga sangat diperlukan itulah alasan mengapa ia kemudian menerapkan wajib melaksanakan ibadah sembahyang disekolah-sekolah bagi anak Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Atas agar pendidikan agama dilakukan sedini mungkin dan menjadi dapat menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka agar dapat menjadi siswa yang cerdas tidak hanya dalam hal keilmuan tapi juga keagamaan. Surat instruksi yang dikeluarkan oleh La Nakka ini ditembuskan kepada beberapa instansi terkait dan semua guru-guru agama dan kepala-kepala sekolah.

Bidang Kebudayaan juga tak luput dari perhatian La Nakka dengan mengeluarkan surat untuk semua kepala kecamatan dalam lingkup Daerah Tingkat II baru yang berisi tentang anjuran dalam mengadakan perlombaan kesenian. Perlombaan dalam bidang kesenian itu dilakukan dalam rangka untuk memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus untuk tahun 1964/1965 adapun peserta yang dianjurkan untuk ikut berpartisipasi adalah para pelajar dan umum sesuai dengan tingkat umurnya sebagai contoh lomba yang dapat diikuti adalah tari-tarian, lagu-lagu daerah, deklarasi sajak. Adapun penilaian dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tergantung dari lomba misalnya :

1. Untuk tarian daerah dinilai dari pakaian, tabuhan, jumlah pemain, cara tariannya, sejarah ringkas perkembangannya.
2. Untuk lagu-lagu daerah dinilai dari teks orisinal, terjemahan teks tersebut adalah bahasa Indonesia, plot dan irama lagu serta pengarangnya, musik yang digunakan untuk mengiringi (Inventaris Arsip Barru 1920-1976 Nomor Registrasi 356).

KESIMPULAN

Iklim pemerintahan di Indonesia selalu saja berubah mengikuti pola perubahan zamannya, Barru misalnya berasal dari sebuah kerajaan besar yang terkenal dimasanya. Pola pemerintahan di Barru berubah dari sistem kerajaan, Onderafdeling, Swapraja, kan keriken dan akhirnya menjadi sebuah Kabupaten Tingkat II Barru. Bupati pertama Kabupaten Barru adalah La Nakka. Semasa menjabat La Nakka menitik beratkan perhatiannya pada pembukaan lahan pertanian untuk petani untuk meningkatkan produksi beras, pembuka jalan di Pekkae untuk menghubungkan Kabupaten Barru dengan Soppeng. Selain itu pendidikan juga menjadi perhatian yang tidak kalah

pentingnya dalam masa pemerintahannya. Baginya pendidikan adalah salah satu cara untuk menghindarkan kita dari penjajahan.

La Nakka menjadi bupati pertama di Kabupaten Barru selama 5 tahun dimulai dari 1960 hingga 1965, banyak perubahan yang terjadi di Barru selama masa jabatannya ini. Dalam karir kemiliterannya ia mendapat banyak penghargaan, background militer dan guru pertanian yang ia miliki membantunya dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Barru.

La Nakka bukanlah putra asli dari Kabupaten Barru sebab ia lahir dan dibesarkan di daerah Bulukumba oleh kedua orang tuanya, dalam kehidupan rumah tangganya ia sempat menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 6 orang anak.

Sistem pembangunan pendidikan yang diterapkan oleh La Nakka adalah ketika ia mengeluarkan suatu kebijakan untuk setiap kepala keluarga (KK) di Kabupaten Barru untuk mengumpulkan segenggam beras setiap kali memasak. Segenggam beras ini nantinya dikumpulkan. Kemudian dijual kembali lalu uangnya digunakan untuk membangun sekolah, membayar gaji pegawai dan guru dan membangun sarana dan prasarana di Kabupaten Barru.

Dalam masa jabatannya La Nakka memerintah tidak dengan cara otoriter hal ini dikarenakan didikan dari orang tuanya sejak kecil, selain cerdas ia juga dikenal sebagai sosok yang religius, kerendahan hatinya menjabat terbukti ketika pertama kali menggaji pegawainya ia menggunakan uang pribadinya sendiri, selain itu ia juga membangun rumah dinas untuk pegawai menggunakan uang tabungannya. Hubungannya dengan para pegawai cukup dekat. Semasa menjabat ia juga menaruh perhatiannya terhadap bidang seni di Kabupaten Barru dengan mengadakan lomba-lomba pada hari-hari besar seperti 17 Agustus-an.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Pribadi La Nakka

Asrullah.(1994). *Reaksi Masyarakat Sulawesi Selatan Terhadap Negara Indonesia Timur*.Makassar : Unhas, Ilmu Sejarah.

Chairil. (2000). *Barru Periode pendudukan Jepang 1942-1945*.Makassar : Unhas, Ilmu Sejarah.

Darwas, Rasyid. (1990). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah Tingkat II Kabupaten Barru*. Ujung Pandang : Balai Kajian dan Nilai Tradisional.

Departemen Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan. (1991). *Sejarah Perkembangan Pemerintah di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang.

- Departemen Pendidikan dan Seksi kebudayaan Barru. 1983. *Sejarah dan Adat Istiadat Daerah Tingkat II Kabupaten Barru.*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Sejarah dan Adat Istiadat Daerah Tingkat II Kabupaten Barru.*
- Geertz. Clifford. 1983. *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta : Bhratara Karya Aksara.
- Inventaris Arsip Barru 1920-1976 No. Reg. 335 Surat BKDH Barru kepada para pelaksana Pemerintahan wilayah se Kabupaten barru Mengenai Masalah Permintaan nama-nama Penggarap tanah/Sawah Ornamen dan Ambsvelden di Daerah Tingakat II Barru salinan 10 Juni 1961.
- Inventaris Arsip Barru 1920-1976 No Reg 131. Surat menyurat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru yang berhubungan dengan masalah perlombaan Desa Tahun 1963-1968 di Daerah Kabupaten Barru.
- Inventaris Arsip Barru 1920-1976 No Reg. 382. Instruksi BKDH Barru Nomor : 11 / KDH / 1963 mengenai masalah pemberantasan buta agama di Daerah Tingkat II Barru.
- Inventaris Arsip Barru 1920-1976 No Reg. 287. Verslag rapat pembentukan koperasi Lampoko Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
- Inventaris Arsip Barru 1920-1976 No. Reg. 356. Surat kepala inspeksi kebudayaan Daerah Tingkat II Barru kepada kepala Kecamatan se-Kabupaten Barru mengenai anjuran perlombaan kesenian masing-masing Kecamatan.
- Inventaris Arsip Barru 1920-1976 No. Reg. 93. Surat keputusan BKDH Barru No : 52/1962 mengenai pemberian tunjangan keuangan daerah kacau kepada pegawainegeri sipil/daerah di Kabupaten Barru. Salinan 23 Februari 1962.
- Inventaris Arsip Barru 1920-1976 No. Reg. 190. Seruan bersama muspida Kabupaten Barru No : 009 tahun 1964 mengenai larangan kepada masyarakat Barru untuk tidak memberi bantuan kepada pasukan penghianat Andi Selle Mattola (Jon 003/korem IV). 23 April 1963.
- Kadir, Harun. Dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujungpandang : Lembaga Penelitian Unhas dengan Bapeda Tk.1 Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Pengantar sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme dampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama.

- Muhlis.dkk.1985. *Sejarah Kabupaten daerah Tingkat II Sidenreng Rappang*. Ujung Pandang : Laporan Penelitian Unhas.
- Nasikun. Mohtar Mas'oedf. 1987. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Pawiloy, Sarita. Abduh Muhammad. 1989. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang : Depdikbud.
- Pawiloy, Sarita. 1987. *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang : Dewan Harian 45 Propinsi Sulsel.
- Prastowo. Yustinus. dkk. 2014. *Ketimpangan Pembangunan Indonesia Dari Berbagai Aspek*. Jakarta : Infid.
- Putri, Ana Amrina Eka. 2000. *Barru Sampai Dengan Terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Barru*. Makassar : Unhas, Ilmu Sejarah.
- Reid, Anthony. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Rogers. M. Everett. 1985. *Komunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis*. Jakarta: LP3S.
- Sahajuddin. 2011. *Petani Garam di Arungkeke 1950-1985 Suatu Refleksi Kehidupan*. Makassar : Pustaka Sawerigading
- Sjafei, Suwadi dkk. 1981/1982. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional.
- Tanaka, Akira. 1982, *Jepang Modern dan Asia Tenggara*, ed, Review Jepang, Pusat kebudayaan Jepang, Jakarta